

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting untuk menilai kemajuan suatu negara. Tingkat peningkatan pendapatan masyarakat dalam periode waktu tertentu yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2006). Kesejahteraan warga negara dapat memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari ekspansi ekonomi yang cepat dan stabil. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sejumlah elemen kebijakan dapat diterapkan (Primandari, 2017).

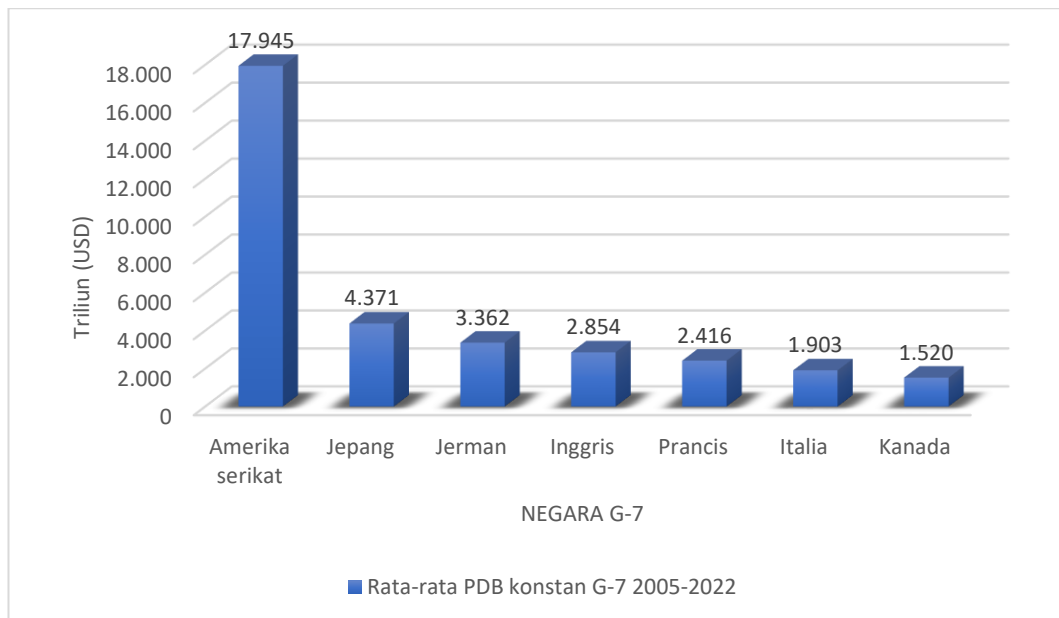
Menurut Sukirno (2006) indikator terukur dari pertumbuhan atau perkembangan ekonomi suatu negara pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut pertumbuhan ekonomi. Salah satu metrik yang sering digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi, kemudian, adalah tingkat pertumbuhan PDB pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDB tahun sebelumnya. PDB suatu tahun merupakan tanda pertumbuhan ekonomi jika lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah perluasan aktivitas ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa suatu masyarakat serta tingkat kemakmurannya. Salah satu cara untuk memahami pertumbuhan ekonomi adalah sebagai masalah makroekonomi jangka panjang yang berubah seiring waktu.

Menurut Kuznets pada penelitian Jhingan dan Guritno (1994) Peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai komoditas ekonomi bagi rakyatnya dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam struktur ekonomi umum masyarakat termasuk dalam definisi yang lebih luas tentang pembangunan ekonomi. Proses peningkatan pendapatan per kapita aktual penduduk suatu negara dari waktu ke waktu sekaligus memperbaiki kerangka kelembagaannya umumnya disebut sebagai pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi mencakup transformasi berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita, kebutuhan akan pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang, dan pada akhirnya peningkatan struktur kelembagaan di semua bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Negara-negara maju biasanya memiliki nilai PDB yang relatif tinggi di bandingkan negara berkembang. Kebanyakan dari negara maju menguasai berbagai sektor produktif yang dapat meningkatkan nilai PDB dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tersedianya sumber daya manusia atau tenaga ahli yang memadai mendorong negara maju untuk lebih tumbuh dan maju lagi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan negara Amerika serikat, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Jepang dan Kanada yang tergabung pada forum G-7 (*Group of seven*).

Pertumbuhan ekonomi di negara G-7 selama beberapa dekade terakhir, mengalami transformasi yang signifikan, dan perkiraan menunjukkan bahwa perubahan ini akan terus berlangsung dengan kecepatan dan skala yang semakin besar di masa mendatang. Yang menariknya, faktor-faktor yang mendorong perubahan saat ini tidak hanya terkait dengan kemajuan teknologi dan tren

globalisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya pengaruh dari kekuatan ekonomi baru. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kelompok G-7 yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Kanada, dan Jepang telah memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap perekonomian dunia (Vu, 2020). Perhitungan pertumbuhan ekonomi diambil dari nilai PDB harga konstan, data yang digunakan memiliki satuan USD yang diambil dari *World bank* :



Sumber: *World Bank* (2025), diolah

Gambar 1. 1
Rata-rata PDB harga konstan negara G-7 tahun 2005-2022

Berdasarkan pada gambar tersebut ditampilkan grafik menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki PDB rata-rata tertinggi, yaitu sekitar 17.945 US\$, yang menegaskan posisi dominannya dalam perekonomian global. Jepang berada di posisi kedua dengan pertumbuhan rata-rata 4.371 US\$, mencerminkan stabilitas ekonominya selama periode penelitian. Jerman 3.362 US\$, Inggris 2.854 US\$ dan Prancis 2.416 US\$ menunjukkan pertumbuhan yang relatif moderat, namun masih lebih tinggi dibandingkan Italia dan Kanada. Italia hanya mencatatkan

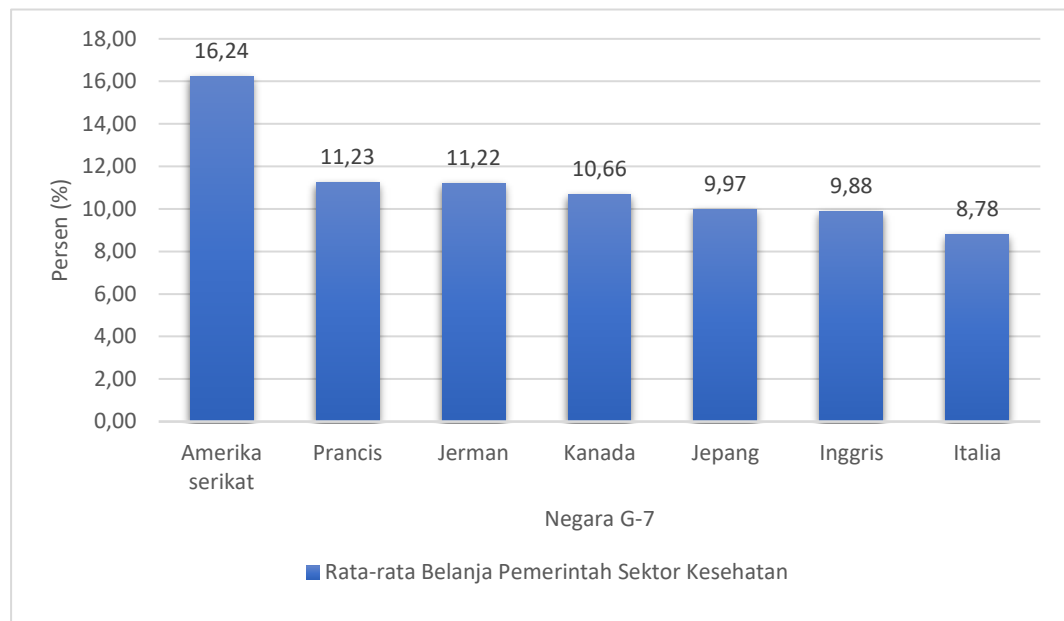
pertumbuhan rata-rata 1.903 US\$, sedangkan Kanada paling rendah dengan 1.520 US\$, menandakan lemahnya pemulihan ekonomi kedua negara tersebut pasca krisis keuangan global 2008 dan krisis utang Eropa.

Secara umum, grafik ini menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam rata-rata pertumbuhan ekonomi antarnegara G-7, meskipun semuanya merupakan negara dengan kapasitas fiskal dan moneter besar. Negara-negara G-7 sebagai kelompok negara maju memiliki kapasitas fiskal dan moneter yang besar, namun tetap menghadapi fluktuasi pertumbuhan ekonomi akibat krisis global pada 2008, krisis utang Eropa, serta pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 2005–2022 menunjukkan Amerika Serikat dan Kanada mampu menjaga pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan negara lain, sedangkan Italia dan Jepang justru mengalami pertumbuhan yang sangat rendah (*World Bank*, 2024). Hal ini menegaskan bahwa besarnya kapasitas fiskal dan moneter tidak serta-merta menjamin kestabilan pertumbuhan ekonomi jika dihadapkan pada permasalahan struktural domestik maupun guncangan eksternal (Auerbach, 2017; Bernanke, 2020).

Menurut *International Monetary Fund* negara G-7 mengalami penurunan dikarenakan kenaikan inflasi global yang tinggi dipicu oleh lonjakan harga energi dan bahan makanan, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga, dan berdampak pada pengeluaran konsumen dan investasi bisnis (IMF, 2024). Kebijakan fiskal adalah salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan seringkali sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006). Kebijakan fiskal adalah proses menciptakan pajak (pendapatan) dan pengeluaran publik atau negara dalam upaya untuk mengurangi fluktuasi siklus

bisnis dan ekonomi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (stabilisasi), memanfaatkan tenaga kerja sebaik-baiknya, dan mencegah inflasi serta tingkat pengangguran yang tinggi (Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, 2018).

Perubahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, seperti bagaimana pendapatan dan belanja pemerintah dikelola, menunjukkan dinamika evolusi kebijakan fiskal (Sriyana, 2012). Ada dua kategori kebijakan fiskal yaitu ekspansif dan kontraktif. Strategi fiskal yang digunakan untuk memerangi inflasi yang sangat tinggi dikenal sebagai kebijakan fiskal kontraktif. Inflasi tinggi terjadi ketika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. Pengurangan belanja pemerintah untuk menurunkan jumlah uang beredar yang berasal dari aliran dana publik melalui proyek-proyek adalah cara kebijakan fiskal kontraktif diterapkan. Selain itu, tarif pajak dinaikkan, yang menurunkan jumlah uang yang dimiliki masyarakat umum. Sebaliknya, kebijakan fiskal ekspansif digunakan selama resesi ekonomi, yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan lambatnya pembangunan ekonomi. Penurunan tarif pajak dan peningkatan belanja pemerintah adalah dua kebijakan yang diterapkan. Belanja pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan merupakan alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks kebijakan fiskal dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan yang baik mendorong produksi, dan pendidikan membantu menciptakan tenaga kerja terampil (Grossman, 2017). Belanja pemerintah sektor kesehatan juga berperan krusial terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi ini tidak hanya mengurangi angka kematian dini, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mendukung ekspansi ekonomi jangka panjang. Berikut adalah rata-rata belanja pemerintah sektor kesehatan di negara G-7.

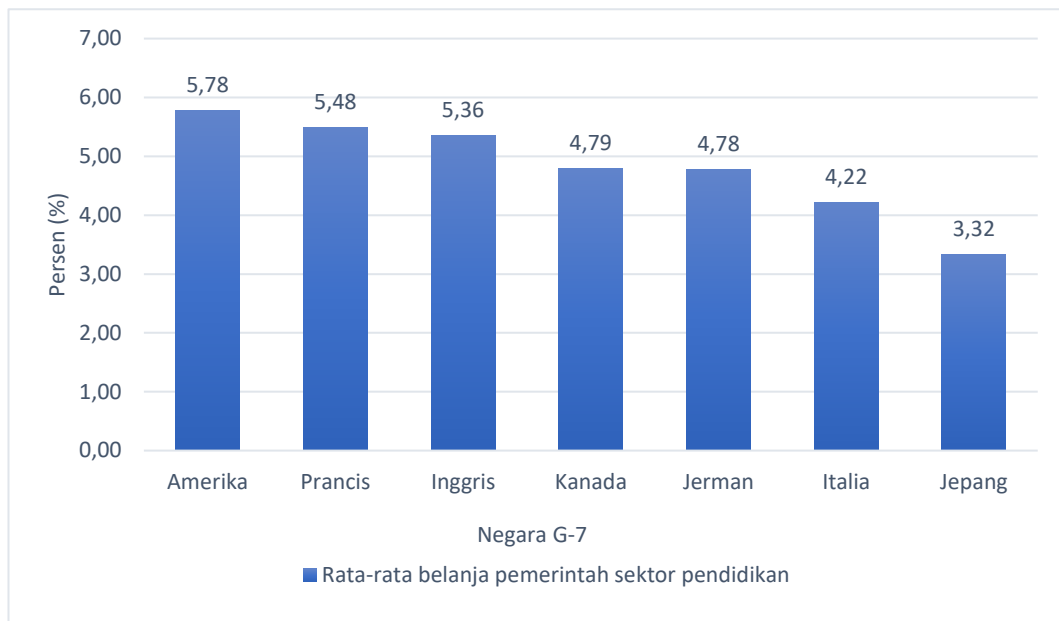


Sumber : World Bank (2025), diolah

Gambar 1. 2

Rata-rata belanja pemerintah sektor kesehatan tahun 2005-2022.

Pada sektor kesehatan, Amerika Serikat menempati posisi paling tinggi dengan rata-rata pengeluaran 16.24% dari PDB. Angka ini jauh melampaui negara G-7 lainnya dan mencerminkan tingginya biaya sistem kesehatan di Amerika Serikat. Sementara itu, Prancis 11.23%, Jerman 11.22%, dan Kanada 10.66% juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mendukung sistem kesehatan universal. Sebaliknya, Italia 8.78%, Inggris 9.88%, dan Jepang 9.97% berada di level lebih rendah, meskipun tetap tinggi dibandingkan negara di luar G-7. Perbedaan ini mencerminkan variasi sistem kesehatan dan efektivitas pembiayaan, di mana negara dengan sistem *universal* cenderung membutuhkan alokasi anggaran lebih besar namun lebih terkendali dibanding sistem berbasis pasar seperti di Amerika Serikat (S. Beraldo, D. Montolio ,2009). Berikut adalah rata- rata belanja pemerintah sektor pendidikan:



Sumber: World Bank (2025), diolah

Gambar 1. 3
Rata-rata belanja pemerintah sektor pendidikan tahun 2005-2022

Berdasarkan data diatas rata-rata belanja pemerintah sektor pendidikan di negara-negara G-7 selama periode 2005–2022 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Amerika Serikat menempati posisi tertinggi dengan rata-rata belanja sebesar 5.78% terhadap PDB, diikuti oleh Prancis 5.48% dan Inggris 5.33%. Angka ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Sementara itu, Jerman 4.78%, Kanada 4.79% dan Italia 4.22% berada pada posisi menengah dengan alokasi yang relatif stabil, sedangkan Jepang memiliki belanja terendah dengan rata-rata hanya 3.22%.

Perbedaan alokasi anggaran ini dapat mencerminkan prioritas kebijakan fiskal masing-masing negara. Negara dengan belanja pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (S. Beraldo, D.

Montolio ,2009). Sebaliknya, belanja yang lebih rendah, seperti pada Jepang, berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

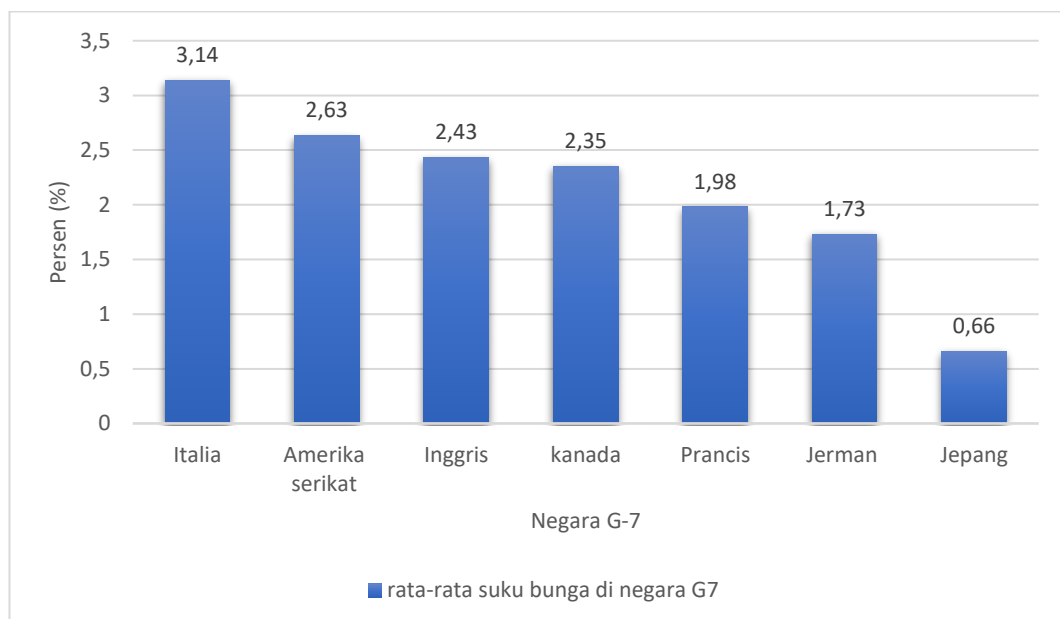
Selain itu, belanja pemerintah sektor kesehatan juga berperan krusial terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi ini tidak hanya mengurangi angka kematian dini, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mendukung ekspansi ekonomi jangka panjang.

Jika dibandingkan, belanja pendidikan di negara G-7 relatif lebih rendah (sekitar 4-6% PDB) dibanding belanja kesehatan (8-16% PDB). Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan menyerap anggaran lebih besar, terutama dalam menghadapi tantangan biaya layanan, penuaan populasi, serta tuntutan inovasi medis. Meski demikian, kedua sektor memiliki peran saling melengkapi: pendidikan meningkatkan keterampilan dan inovasi tenaga kerja, sementara kesehatan memastikan produktivitas jangka panjang. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa investasi simultan pada pendidikan dan kesehatan dapat memperkuat modal manusia secara holistik, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Churchill ,2015).

Dengan demikian, variasi belanja pendidikan dan kesehatan di negara-negara G-7 tidak hanya mencerminkan prioritas fiskal yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bagaimana setiap negara menyeimbangkan strategi pembangunan modal manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Nor dan Yusof ,2025) .Selain kebijakan fiskal ada juga kebijakan moneter yang merupakan tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, menjaga stabilitas harga, dan

menciptakan lapangan kerja (Raysharie et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter menggunakan beberapa instrumen salah satu nya adalah suku bunga dan uang riil. Suku bunga adalah satu variabel kebijakan moneter yang pengaruhnya sangat luas terhadap perekonomian negara dan bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara umum, karena itu suku bunga sangat dijaga perkembangannya (Pangaribuan et al., 2024).

Dalam periode 2005–2022, negara-negara G-7 menghadapi berbagai dinamika besar, seperti krisis keuangan global 2008, kebijakan suku bunga mendekati nol, *quantitative easing*, hingga lonjakan inflasi akibat pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik. Berikut adalah rata-rata suku bunga di negara G-7.



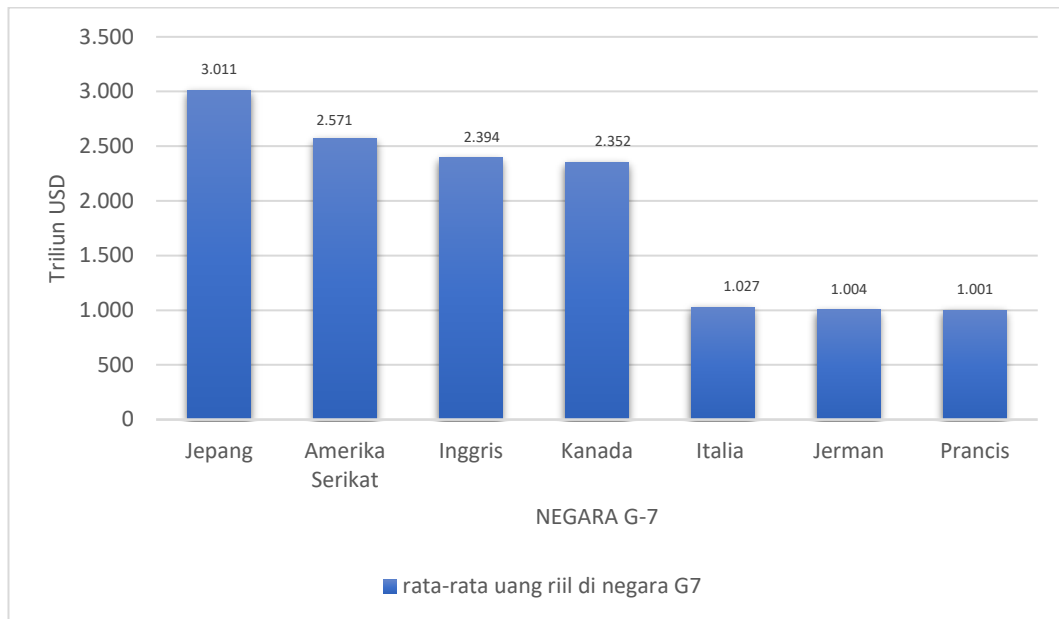
Sumber: OECD (2025), diolah

Gambar 1. 4
Rata-rata Suku Bunga Negara G-7 Tahun 2005-2022

Grafik pada Gambar 1.4 memperlihatkan rata-rata suku bunga negara-negara G-7 selama periode 2005–2022, yang menunjukkan variasi kebijakan moneter antarnegara. Italia mencatat rata-rata suku bunga tertinggi sebesar

3.14%, mencerminkan kebijakan moneter yang relatif ketat untuk menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi. Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris juga menempati posisi tinggi dengan rata-rata suku bunga masing-masing 2.63% dan 2.43%, sejalan dengan kebijakan *The Federal Reserve* dan *Bank of England* yang responsif terhadap krisis keuangan global 2008, pemulihan ekonomi, hingga gejolak inflasi pasca pandemi COVID-19 (Nguyen ,2022). Kanada memiliki rata-rata suku bunga 2.35%, lebih tinggi dibandingkan Prancis 1.98% dan Jerman 1.73%, yang cenderung menjalankan kebijakan moneter moderat untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi (Nusair & Olson, 2025). Adapun Jepang menempati posisi terendah dengan rata-rata suku bunga hanya 0.66%, konsisten dengan kebijakan suku bunga nol hingga negatif yang telah lama diterapkan Bank of Japan untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan risiko deflasi (Shen et al., 2019). Variasi ini menegaskan bahwa meskipun negara-negara G-7 menghadapi tantangan global yang sama, seperti krisis finansial, pandemi, dan ketidakpastian geopolitik, respons kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga berbeda-beda, dan perbedaan tersebut berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi masing-masing negara (Chang dan Su, 2015).

Variabel kebijakan moneter terakhir pada penelitian ini adalah uang riil. Berikut adalah data uang riil di negara G-7 pada tahun 2005-2022:



Sumber: World Bank (2025), diolah

Gambar 1. 5
Rata-rata uang riil di negara G-7 tahun 2005-2022

Pada gambar 1.5 Berdasarkan Gambar di atas, rata-rata uang riil di negara G-7 selama periode 2005–2022 menunjukkan variasi antarnegara. Jepang memiliki rata-rata uang riil tertinggi sebesar 3.110 US\$, diikuti oleh Amerika Serikat 2.571 US\$, Inggris 2.394 US\$, dan Kanada 2.352 US\$. Sementara itu, Italia memiliki rata-rata sebesar 1.027 US\$, sedangkan Jerman 1.004 US\$ dan Prancis 1.001 US\$ menempati posisi terendah. Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam kebijakan moneter dan tingkat likuiditas ekonomi masing-masing negara. Tingginya rata-rata uang riil di Inggris, Prancis, dan Italia menunjukkan kondisi moneter yang relatif longgar, di mana pasokan uang beredar riil yang lebih besar mampu mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Hal ini sesuai dengan pandangan teori Keynesian, yang menekankan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dapat merangsang permintaan agregat dan pada akhirnya meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, negara dengan rata-rata uang riil lebih rendah seperti Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan kecenderungan penerapan kebijakan moneter yang lebih ketat atau kondisi inflasi yang menekan daya beli masyarakat. Dalam konteks teori monetaris yang dikemukakan oleh Milton Friedman, peredaran uang yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan likuiditas dan mengurangi aktivitas investasi sektor riil.

Secara empiris, data ini mengindikasikan bahwa uang riil memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7, meskipun besarnya pengaruh tersebut berbeda-beda tergantung pada kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter masing-masing negara. Negara-negara dengan tingkat uang riil yang lebih tinggi cenderung menunjukkan stabilitas ekonomi yang lebih baik karena aktivitas ekonomi dapat ditopang oleh tingkat likuiditas yang cukup. Sebaliknya, negara dengan tingkat uang riil rendah menghadapi risiko perlambatan ekonomi akibat terbatasnya permintaan agregat. Dengan demikian, hasil analisis ini mendukung teori bahwa kebijakan moneter yang mampu menjaga kestabilan uang riil merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara maju seperti G-7.

Periode 2005–2022 juga mencakup pandemi COVID-19 yang menimbulkan tantangan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi global. Sebagian besar negara G-7 mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, seperti Kanada - 5,04% dan Prancis -7,44%, yang mendorong pemerintah meningkatkan pengeluaran darurat dan bank sentral menurunkan suku bunga hingga mendekati nol. Respons kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas instrumen fiskal dan moneter dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Analisis data per negara menunjukkan variasi respons terhadap kebijakan. Misalnya, Amerika Serikat mampu memanfaatkan stimulus fiskal dan moneter untuk memulihkan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Italia atau Jepang. Hal ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kapasitas fiskal, dan efektivitas kebijakan moneter (Putri et al., 2025). Data suku bunga dan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa negara dengan respons cepat cenderung mengalami pemulihan ekonomi lebih baik.

Selain itu, belanja pemerintah sektor kesehatan memiliki efek jangka panjang yang berbeda dibandingkan sektor pendidikan. Pendidikan meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitas nasional meningkat, sedangkan kesehatan lebih banyak memengaruhi daya tahan tenaga kerja dan konsumsi domestik (Rifa'i dan Moddilani, 2021). Data G-7 menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan relatif lebih stabil dibandingkan kesehatan, misalnya di Inggris yang berada di kisaran 4,91–5,90%, mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Uang riil berperan dalam menentukan kapasitas konsumsi dan investasi masyarakat. Stabilitas uang riil penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Data G-7 menunjukkan bahwa selama periode 2005–2022, uang riil relatif stabil, seperti di Jepang 30,11% dan Inggris 23,94%, yang mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi terlihat jelas dari data historis. Misalnya, saat pengeluaran pemerintah dan suku bunga menurun drastis selama krisis atau pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (Agusmianata et al., 2017). Sebaliknya, kombinasi

kebijakan yang tepat mampu memulihkan pertumbuhan, terlihat pada Amerika Serikat dan Kanada yang mencatat pertumbuhan positif setelah penerapan stimulus fiskal dan moneter.

Selain faktor kebijakan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti krisis finansial global, fluktuasi harga minyak, dan covid-19 (Nurhuda et al., 2025) . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiskal dan moneter penting, pertumbuhan ekonomi tetap dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah.

Penelitian ini penting untuk memahami efektivitas instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara maju. Analisis data dari 2005–2022 memberikan gambaran jangka panjang tentang bagaimana negara-negara G-7 menyeimbangkan pengeluaran publik, suku bunga, dan stabilitas moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada penelitian Mahzalena dan Juliansyah (2019) menggunakan metode penelitian *vector autoregression* (VAR) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara positif namun tidak signifikan sedangkan pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian Yusuf et al., (2024) yang menggunakan metode penelitian regresi linier berganda menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan untuk belanja pemerintah sektor pendidikan tidak memberikan dampak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Iswahyudi dan

Cahyono (2025) yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2014–2023. Menggunakan metode penelitian yaitu regresi data panel menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan juga tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada penelitian Sciences dan Windhoek (2021) yang membahas suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter menggunakan metode penelitian *Vector Autoregressive model* (Var) mendapatkan hasil bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian Ulum dan Syaputri (2023) yang menyatakan bahwa Suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Pada penelitian Muhammad et al., (2024) yang menganalisis uang riil dalam jangka pendek menggunakan metode *dynamic ordinary least squares* (DOLS) menunjukkan bahwa uang riil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pada penelitian Joseph (2019) yang menganalisis tentang uang riil pada negara Nigeria dan mendapatkan hasil bahwa uang riil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan dalam jangka panjang uang riil mendapatkan hasil negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian Mamangkey et al., (2025) yang membahas pengaruh uang riil terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara dengan metode analisis regresi linier berganda

mendapatkan hasil penelitian bahwa uang riil secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih banyak beberapa perbedaan mengenai hasil penelitian dari belanja pemerintah sektor kesehatan, belanja pemerintah sektor pendidikan, uang riil dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk meneliti mengenai pengaruh belanja pemerintah sektor Kesehatan, belanja pemerintah sektor Pendidikan, suku bunga dan uang riil terhadap pertumbuhan ekonomi negara G-7.

Dalam penelitian ini terdapat *research gap* yang mencakup *methodology gap* yang berbeda dari *methodology gap* sebelumnya yaitu penggunaan *Fully Modified Ordinary Least Squares* (FMOLS). Celah penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut dengan periode data yang lebih panjang (2005–2022) dan metode panel data agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dan *novelty* pada penelitian ini yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni beberapa penelitian terdahulu hanya menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara terpisah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Namun, studi-studi tersebut belum menganalisis konteks gabungan dari pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju yang mencakup negara G-7 yang merupakan kelompok negara dengan pengaruh besar terhadap perekonomian global, Penelitian ini difokuskan menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7. Berdasarkan *research gap* dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang maka dapat diambil permasalahan perlu diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

- 1 Apakah belanja pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7?
- 2 Apakah belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7?
- 3 Apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7?
- 4 Apakah uang riil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7.
2. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7.
3. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7.
4. Menganalisis pengaruh uang riil terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang).

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan untuk mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura dan pihak yang melakukan penelitian sejalan dengan literatur dan topik yang sama.

c. Bagi Masyarakat dan sektor swasta

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan ekonomi, investasi, dan pengelolaan sumber daya.

2. Manfaat Teoritis

a. Menambah kajian empiris dalam literatur ekonomi makro terkait hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara maju seperti G-7.

- b. Memberikan kontribusi ilmiah berupa pengujian variabel spesifik yaitu belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan serta indikator moneter berupa suku bunga dan uang riil, yang relatif masih jarang dikaji secara bersamaan.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik serupa dengan menggunakan metode atau periode penelitian yang berbeda.